

# & Community Services & Social Work Bulletin

Community Services and  
Social Work Bulletin

Volume 3

Nomor 1

Page 1-74

Tahun 2023

e-ISSN 2828-027X



# Community Services & Social Work Bulletin

## **IMPLEMENTASI METODE K-MEANS DAN K-MEDOIDS PADA PENGELOMPOKAN PROVINSI INDONESIA BERDASARKAN ASPEK PENDIDIKAN PEMUDA**

**Halima Tussyakdiah<sup>1</sup>, Insani Hasanah<sup>1</sup>, Sri Arista Panggola<sup>1</sup>, Tiara Ramdhanti<sup>1</sup>, Retno Permatasari<sup>1</sup>, Cusanti<sup>1</sup>, Edy Widodo<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Indonesia, Indonesia

1-10

## **HUBUNGAN POLA HIDUP WANITA LANSIA DIMASA MUDA DENGAN DIAGNOSA PENYAKIT DEGENERATIF WANITA LANSIA**

**Irwanti Gustina<sup>1</sup>, Putri Sarah Dita<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Binawan, Indonesia

11-19

## **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KEMIRI KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER**

**Firdasari Khoirun Nisa<sup>1</sup>, Hety Mustika Ani<sup>1</sup>, Wiwin Hartanto<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Jember, Indonesia

20-38

## **PEMBERDAYAAN WARGA DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KECAMATAN SERPONG UTARA KOTA TANGERANG SELATAN**

**Jukri<sup>1</sup>, Tito Inneka<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Yuppentek, Indonesia

39-41

## **WEBSITE HIV/AIDS BAGI KADER DI PIMPINAN RANTING 'AISYIYAH BALECATUR YOGYAKARTA**

**Dhesi Ari Astuti<sup>1\*</sup>, Nurul Kurniati<sup>1</sup>, Mega Ardina<sup>1</sup>, Erwin Rasyid<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

42-68

## **THE EXISTENCE OF SURABI BANDUNG WITH A NEW TASTE**

**Rizky Asyahri Setiabudiarto<sup>1\*</sup>, Almira Amalia<sup>1</sup>, Nurmala<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Al-Azhar, Indonesia

59-65

## **SOSIALISASI PENTINGNYA DIGITAL MARKETING UNTUK PEMASARAN PRODUK UMKM MASYARAKAT DESA KARANG SARI KOTA TANGERANG**

**Syepry Maulana Husain<sup>1\*</sup>, Muhammad Lutfhi Aksani<sup>1</sup>, Firdiansyah Firdaus Basri<sup>1</sup>, Muhammad Rizka Saputra<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

66-74

# PEMBERDAYAAN WARGA DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KECAMATAN SERPONG UTARA KOTA TANGERANG SELATAN

Jukri<sup>1</sup>, Tito Innaka<sup>1\*</sup>

1 Universitas Yuppentek, Indonesia

\*Correspondence email: tw.innaka1987@gmail.com

Received: 23 April 2023; Accepted: 10 June 2023; Published: 14 June 2023

doi: 10.31000/cswb.v3i1.10371

---

**Abstract:** A fire-free urban community environment can be created through early fire prevention and suppression efforts. This early fire prevention and suppression aims to develop community-based fire preparedness. The forms of fire prevention efforts carried out by the community include simulations, counselling, and training on fire hazards, as well as being a member of the Fire Volunteer Front. It is hoped that this model will be more easily accepted by the public because it is part of the South Tangerang City Fire and Rescue Service program.

**Keyword:** Empowerment; Fire; Fire Prevention.

---

## PENDAHULUAN

Kebakaran merupakan bencana yang paling sering dihadapi dan bisa digolongkan sebagai bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Untuk menanggulangi kebakaran di Wilayah Kota Tangerang Selatan Khususnya di Kecamatan Serpong Utara, dalam hal tersebut warga ikut terlibat untuk penanganan pertama dalam penanggulangan kebakaran. Dikarenakan respon time dan jarak yang harus ditempuh Pemadam Kebakaran ke lokasi kebakaran tidak memungkinkan dalam waktu 15 menit untuk sampai. Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pemadam Kebakaran setempat rutin melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dalam upaya mencegah atau meminimalkan potensi dampak bencana kebakaran pada masa mendatang diperlukan perencanaan program mitigasi dan kesiagaan terhadap bencana kebakaran dengan melibatkan warga setempat.

Salah satu cara dalam upaya mencegah kebakaran adalah dengan mitigasi, mitigasi adalah upaya mengeliminasi, menurunkan/meminimalkan risiko bahaya bencana pada populasi yang rentan. Lingkup mitigasi meliputi eliminasi dan reduksi risiko serta transmisi tanggung jawab : Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008. Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Fokus mitigasi adalah mengeliminasi atau membatasi kemungkinan kejadian bencana, dan menurunkan kerentanan populasi. Kesiagaan



terhadap potensi bencana adalah suatu bentuk upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam merespon secara efektif ancaman dan dampak bencana dan segera pulih dari dampak jangka panjang. Partisipasi aktif masyarakat memainkan peran yang paling penting dalam aspek kesiagaan terhadap bencana. perumahan dengan penyebab utama sistem kelistrikan. Faktor kelalaian masyarakat mendominasi sebagai penyebab kebakaran. Hal tersebut memunculkan pertanyaan besar tentang ketidakpedulian masyarakat terhadap berbagai penyuluhan dan pendekatan yang dilakukan jajaran Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kota Tangerang Selatan khususnya di Kecamatan Serpong Utara. Mengingat dalam satu wilayah kelurahan ditemukan kejadian kebakaran sampai belasan kali. Kegiatan penanggulangan bencana yang efektif secara ideal dilakukan melalui tiga tahap kegiatan. Pertama, upaya pencegahan atau mitigasi dan kesiagaan pada saat sebelum terjadi bencana. Kedua, upaya penyelamatan pada saat terjadi bencana. Ketiga, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi setelah kejadian bencana dalam penanganan bencana di Indonesia cenderung kurang efektif antara lain sebagai akibat paradigma penanganan bencana yang bersifat parsial, sektoral dan kurang terpadu. Tanggapan terpusat pada upaya pemerintah yang masih terbatas pada pemberian bantuan fisik yang hanya dilakukan pada fase kedaruratan. Meskipun perhatian terhadap bencana terlihat meningkat, tetapi upaya tersebut perlu mendapatkan perhatian terutama berhubungan dengan antisipasi, rehabilitasi, dan mitigasi bencana yang masih memerlukan perencanaan, implementasi dan sosialisasi secara lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat dapat diciptakan melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran yang dilakukan melalui rekrutmen, pembinaan, pemberian peralatan, dan penyusunan struktur organisasi yang jelas untuk membagi tugas pada saat darurat. Seorang informan dari Masyarakat mengatakan secara rinci bentuk langkah-langkah kerja tersebut. Sebelum kebakaran, ketua RT mendata jumlah kepala keluarga; bahan dasar konstruksi bangunan rumah, kerapatan bangunan rumah; keberadaan pompa, saluran air, pasir dan jumlah alat pemadam kebakaran, pada saat dan pasca kebakaran, memanfaatkan anggota Barisan Relawan Kebakaran atau yang di singkat BALAKAR yang meliputi seksi logistik, keamanan, pemadaman api, komunikasi, evakuasi. Seorang informan kelurahan dari Kecamatan Serpong Utara, mengusulkan bahwa RW menyusun langkah kerja upaya mencegah kebakaran berupa pemberian motivasi dan himbauan kepada warga agar berhati-hati menggunakan listrik, sosialisasi bahaya kebakaran akibat arus listrik dan ledakan kompor. Jenis kegiatan yang perlu dilakukan masyarakat untuk menciptakan lingkungan aman kebakaran meliputi penyuluhan, sosialisasi, dan himbauan. Kegiatan untuk perilaku aman kebakaran meliputi pemeriksaan instalasi listrik rumah, penggantian kabel usang, mencegah pencurian aliran listrik, pelatihan BALAKAR, pemeriksaan berkala dan identifikasi berbagai potensi bahaya kebakaran, serta saling mengingatkan anggota keluarga.

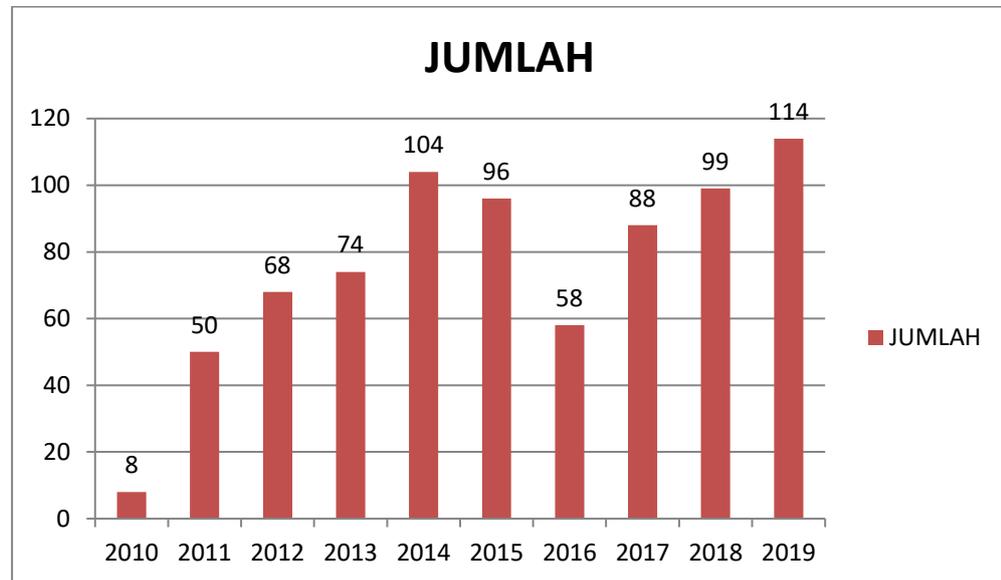
Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai kebijakan Kebakaran merupakan salah satu kejadian yang tidak diinginkan oleh setiap manusia. Kejadian ini kerap terjadi baik karena faktor lingkungan atau kelalaian masyarakat.

Kebakaran dapat mengakibatkan suatu kerugian yang sangat besar baik kerugian materil dan immateriil. Sebagai acuan tersebut keterlibatan Masyarakat pada Peristiwa kebakaran masih menjadi momok bencana paling menakutkan. Hanya dalam waktu sekejap, kobaran api selalu menimbulkan banyak dampak kerugian. Oleh karenanya, kini Pemerintah Kota Tangerang Selatan Khususnya di Kecamatan Serpong Utara, terus berupaya mencegah dan meminimalisir terjadinya bencana kebakaran. Akibat bencana tersebut dipastikan telah menyebabkan kerugian harta benda. Kalau ditaksir total kerugiannya mencapai puluhan bahkan sampai miliar rupiah dan juga telah merenggut nyawa. Seperti kasus kebakaran terbesar yang terjadi pada Rabu (4/3/2015 silam). Peristiwa yang terjadi di Komplek pergudangan Multi Guna, Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, itu menyebabkan dua orang korban meninggal akibat terpanggang kobaran api. "Total jumlah korban jiwa sudah ada dua orang meninggal dunia, 90 persen penyebab utama kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik atau korsleting. Sedangkan 10 persen disebabkan oleh faktor kelalaian manusia (human error). Sebagai contoh kerugian nyawa, harta dan terhentinya proses atau jalannya suatu produksi/aktivitas, jika tidak di tangani dengan segera, maka akan berdampak bagi penghuninya. Salah satu standar penting yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional dalam Standar Nasional Indonesia mengenai perlindungan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan bertingkat.

Sistem kebakaran harus direncanakan dari awal pembangunan konstruksi gedung, khususnya untuk sistem proteksi kebakaran pasif yang meliputi jenis bahan bangunan yang digunakan, kompartemenisasi ruangan dan unsur lainnya seperti tata letak penempatan gedung, jalan lingkungan, konstruksi jalan keluar, penempatan hidran. Pada saat terjadi kebakaran, ada empat hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan bahaya api, yaitu penghuni bangunan (manusia), isi bangunan (harta), struktur bangunan dan bangunan yang letaknya bersebelahan. Tiga hal yang pertama berkaitan dengan bahaya api yang ada pada bangunan yang terbakar, sedangkan hal yang terakhir merupakan pertimbangan bagi bangunan lainnya dan lingkungan komunitas secara menyeluruh.

Tingginya potensi kerugian akibat kebakaran pada bangunan proses evakuasi penghuni gedung, membuat pihak pengelola gedung perlu mengantisipasi bahaya kebakaran yang tidak bisa diprediksi kejadiannya. Meskipun tingkat kesadaran akan pentingnya sistem proteksi kebakaran semakin meningkat, namun masih banyak dijumpai bangunan-bangunan yang tidak dilindungi dengan sarana proteksi kebakaran, atau sarana yang terpasang tidak memenuhi persyaratan. Kurangnya perhatian terhadap sistem proteksi kebakaran ini dikhawatirkan akan menyebabkan suatu kondisi atau dampak negatif nantinya, yaitu menurunnya tingkat keamanan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna gedung.

**Gambar 1. Statistik kebakaran setiap tahunnya di Kota Tangerang Selatan.**



NO	KECAMATAN	TAHUN KEJADIAN									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	SERPONG	1	7	8	5	14	18	8	12	23	22
2	SERPONG UTARA	1	5	9	7	9	15	7	10	15	15
3	CIPUTAT	1	6	6	13	11	10	9	10	18	18
4	CIPUTAT TIMUR	1	4	5	11	6	7	8	8	6	9
5	PONDOK AREN	2	12	12	15	25	16	16	23	15	16
6	PAMULANG	2	7	17	10	20	23	8	16	17	22
7	SETU		3	2	4	4	1	0	2	4	8
8	PERBATASAN		6	9	9	15					
9	KOTA TANGERANG						3		2	1	1
10	KABUPATEN TANGERANG							1	2		3
11	DEPOK						1		2		
12	KABUPATEN BOGOR						2	2	1		1
13	DKI JAKARTA										1
	<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>50</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>104</b>	<b>96</b>	<b>58</b>	<b>88</b>	<b>99</b>	<b>114</b>

**Table 2. Data kebakaran di kota Tangerang Selatan Pertahun**

Bencana kebakaran di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018 tercatat 99 kali dan pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun sebelumnya tercatat sampai 114 kali terjadi kebakaran, khususnya di Kecamatan Serpong Utara pada tahun 2018 tercatat 15 kali dalam hal kebakaran sampai pada tahun 2019 tidak ada kenaikan terjadinya kebakaran dan tercatat 15 kali terjadi kebakaran . yaitu kebakaran lahan serta kebakaran gedung dan pemukiman. Walau tidak ada perubahan pada tahun sebelumnya pasti bisa di perkecil lagi, keterlibatan warga sangat penting dalam masalah penanggulangan Kebakaran walaupun masih banyak warga yang cuek dalam perkara kebakaran dengan alasan sibuk dengan pekerjaan ada juga yang beralasan karena takut dan ada

juga yang menanyakan materi serta warga juga bilang sudah adanyan team yang menanggulangi kebakaran yaitu pemadam kebakaran itu sendiri maka dari itu dari dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bekerja sama dengan kantor Kecamatan Seporng Utara dalah Hal Penyuluhan Kepada warga untuk membekali meraka dengan pengetahuan penanggulangan kebakaran supaya meminimalisir akan terjadinya kebakaran di kecamatan Seprong Utara .

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui Pemberdayaan Warga dalam Penanggulangan Kebakaran di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Definisi konsep pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah upaya sekumpulan orang yang memilih untuk menjadikan dirinya dalam menempuh keadilan dan berdap menjadi secara efektif esensial dan struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, maupun internasional, termasuk didalam bidang politi, ekonomi maupun lainnya. Upaya ini dilakukan dalam mendukung gerakan keadilan sosial bagi masyarakat. Yang bisa dilakukan dengan membentuk komunitas, organisasi sosial yang ada di dalam masyarakat perkotaan ataupun di dalam kehidupan masyarakat desa. Dari penjelasan mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat di atas, setidaknya dapat dikatakan bahwa kecenderungan pemberdayaan di dalam kehidupan masyarakat mengndung dua unsur atau konsep penting.

Konsep pemberdayaan masyarakat tersebut adalah, proses yakni suatu pemberdayaan yang menekankan pada proses struktural kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya satu sama lainnya. Keberdayaan ini dibentuk dengan kerjasama dan saling mendorong antar kehidupan masyarakat dari data Sekunder yakni suatu konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada proses menstimulasi dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan atau keberdayaan melalui dialog yang interaktif, antara pihak satu dengan lainnya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut: Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi dalam Ar Ruzz Media,2007, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Selaras dengan yang diungkapkan oleh Zubaedi, bahwa Ginandjar Kartasasmitha (PT Pusaka Cisendo,1996), menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau

potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) ; pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumberdaya juga lebih efisien.

Tahapan Pemberdayaan Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut :

Tahap persiapan, yaitu petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan.

Tahap assesment, tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan.

Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

Tahap formulasi rencana aksi, pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan ke pihak penyandang dana.

Tahap pelaksanaan, pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan

masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik bisa melenceng saat di lapangan.

Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator.

Tahap terminasi, tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya.

## **METODE**

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, atau biasa disebut dengan istilah data primer; dimana data tersebut diperoleh dari dokumen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan, sedangkan data sekunder, adalah hasil olahan penulis yang diambil dari beberapa referensi buku, jurnal, maupun dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahap terpenting dalam penelitian. Karena dengan adanya teknik pengumpulan data akan diperoleh data yang disajikan sebagai hasil penelitian, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sugiyono (2011) Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengumpulan Data dengan Observasi
- b. Pengumpulan Data dengan Wawancara
- c. Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumen
- d. Triangulasi

Pemilihan informan dilakukan dengan penggunaan *key informan* (informan kunci), yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan mampu menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang obyek penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan serta mendapatkan data yang spesifik mengenai Pemberdayaan Warga dalam Penanggulangan Kebakaran di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Informan adalah Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sugiyono (2011), mengemukakan bahwa ada 3 langkah dalam analisis data yaitu Reduksi Data, Data Display dan Conclusion Drawing Verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut penjelasan mengenai Pemberdayaan Warga dalam Penanggulangan Kebakaran di Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Dalam Kegiatan Pemberdayaan masyarakat ada 7 tahapan dalam kegiatan ini, yaitu sebagai berikut:

### Tahap persiapan

Dalam tahap ini petugas penyiapan lapangan. Penyiapan petugas dimasukkan untuk menyamakan persepsi antara anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan dipilih. Sedangkan penyiapan lapangan dimaksudkan untuk melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran pemberdayaan. Dalam hal ini kami Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memberikan pelatihan dasar tentang penanggulangan kebakaran agar warga/masyarakat mengerti cara menanggulangi adanya indikasi terjadinya kebakaran agar tidak menjadi kebakaran yang besar.

Dinas Pemadam Kebakaran gait mensosialisasikan tentang penanggulangan kebakaran,. Sosialisasi adalah bentuk komunikasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sesuatu program, yang dapat mendorong masyarakat agar menjalankan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan dinas atau Lembaga. Tujuan utama dari sosialisasi adalah agar individu disosialisasi itu perubahan baik pada aspek pengetahuan, sikap atau keterampilan kearah yang diharapkan pelaksanaan sosialisasi sebagian tersebut juga berupa perilakunya sesuai tujuan yang ditetapkan. Maka dari itu keseriusan Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menanggulangi kebakaran beserta masyarakat agar kebakaran di Kota Tangerang Selatan setiap tahunnya berkurang bahkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berharap *Zero Fire* di kota Tangerang Selatan Kalo masyarakat bersinergis tentang bahaya kebakaran dan penanggulangannya.

### Tahap Assesment

Tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran pemberdayaan. Pada tahapan ini data dimana Kebakaran di Kecamatan Serpong Utara menjadi Peringkat Ke 5 dalam Kejadian Kebakaran pada tahun 2019. Berikut data.nya sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	TAHUN KEJADIAN									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	SERPONG	1	7	8	5	14	18	8	12	23	22
2	SERPONG UTARA	1	5	9	7	9	15	7	10	15	15
3	CIPUTAT	1	6	6	13	11	10	9	10	18	18
4	CIPUTAT TIMUR	1	4	5	11	6	7	8	8	6	9
5	PONDOK AREN	2	12	12	15	25	16	16	23	15	16
6	PAMULANG	2	7	17	10	20	23	8	16	17	22
7	SETU		3	2	4	4	1	0	2	4	8
8	PERBATASAN		6	9	9	15					
9	KOTA TANGERANG						3		2	1	1
10	KABUPATEN TANGERANG							1	2		3
11	DEPOK						1		2		
12	KABUPATEN BOGOR						2	2	1		1
13	DKI JAKARTA										1
JUMLAH		8	50	68	74	104	96	58	88	99	114

Pemberdayaan warga dalam hal Penanggulangan Kebakaran adalah program kami Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang ada di seksi penyuluhan, fungsinya untuk membantu petugas pemadam apabila ada hambatan untuk menuju kelokasi agar dapat cepat di padamkan. Pada Umumnya ketika Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan kegiatan yang melibatkan masyarakat di setiap Kelurahan di kecamatan serpong Utara pastinya diperlukan anggaran atau insentif untuk masyarakat, karena belum adanya regulasi yang menetapkan untuk masalah anggaran yang diberikan kepada masyarakat.

### **Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan**

Pada tahap ini fasilitator secara partisipatif mencoba melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Permasalahan yang dimaksud adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penanggulangan awal bahaya kebakaran. Masyarakat sering kali panik apabila terjadi kebakaran di lingkungan mereka yang membuat kebakaran justru semakin besar.

Walikota Tangsel mengatakan perekrutan Balakar ini akan menjadi suatu hal yang baik bagi saya dan jajaran Pemkot Tangsel karena sangat membantu Relawan Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan guna mengantisipasi dan menangani bencana kebakaran. Meskipun pada saat ini Anggota Balakar yang sudah direkrut belum mendapatkan gaji atau pun uang insentif perbulannya saya akan mengusahakan agar mereka mendapatkannya. Pada Tahapan ini Strategi Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu Membentuk tim Barisan Relawan Kebakaran yang biasa di sebut BALAKAR di setiap Kecamatan dan Kelurahan Yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Dalam Hal Pengrekrutan BALAKAR ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan membentuk Barisan Relawan

Kebakaran dengan Mengirimkan Surat tentang keikutsertaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran kepada Tiap Kecamatan dan Kelurahan untuk memilih siapa saja yang akan mengikuti kegiatan Pelatihan Bagaimana Mencegah dan Menanggulangi kebakaran, dan tidak ada syarat husus untuk warga yang mau ikut menjadi BALAKAR.

Dalam Mengatasi permasalahan ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan juga terus Berkoordinasi Kepada Eksekutif dan legislatif menyangkut regulasi tentang insentif untuk warga yang sudah menjadi Barisan Relawan Kebakaran, untuk memberi semangat warga Dinas Damkar hanya memberikan uang transport saja bukan setiap bulan akan tetapi di setiap kegiatan pelatihan yang di adakan setiap tahunnya oleh Dinas Pemadam Kebakaran dengan Anaggaran Penadapatan Belanja Daerah (APBD).

### **Tahap Formulasi Rencana Aksi**

Pada tahap ini fasilitator membantu masing-masing masyarakat sasaran pemberdayaan untuk memformulasikan gagasan mereka terutama dalam bentuk tulisan bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal yang akan ditujukan kepihak penyandang dana. Dinas Pemadam Kebakaran Melakukan kegiatan pelatihan untuk masyarakat di biayai oleh APBD Kota Tangerang Selatan.

Sistem yang sudah ada dalam hal pemberdayaan warga adalah di setiap kelurahan mempunyai ketua tim Balakar untuk berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam hal penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan agar lebih cepat kami dalam hal Pemadaman dan Penyelamatan korban. Dalam urusan dana atau anggaran menjadi perhatian husus, Sementara Dinas Pemadam Kebakaran hanya memfasilitasi dalam Kegiatan Pelatihan saja yaitu Uang Transport apabila sudah adanya regulasi pastinya ada kepastian tentang insentif tiap bulannya dan biasa diikuti sertakan piket bersama anggota damkar dan tupoksinya hanya membantu tidak untuk memadamkan dan menyelamatkan korban bencana Kebakaran.

Penanggulangan bencana kebakaran merupakan suatu tugas berat bagi dinas pemadam kebakaran karena akan berhadapan dengan masalah jiwa, namun itu bukan sebuah hambatan akan tetapi perlu ada sinergi baik moril maupun materil antara pengelola dinas pemadam kebakaran dengan balakar. Terkait dengan pengelolaan bencana kebakaran tentu dinas pemadam kebakaran harus memiliki anggaran yang lebih karena bencana datang tidak kita ketahui (secara tiba-tiba) sehingga perlu ada peningkatan alokasi dana pelatihan balakar semakin meningkatnya rumah padat penduduk.

### **Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan agar apa yang telah dirumuskan bersama-sama. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan memerlukan adanya peran dari masyarakat, dan fasilitator. Perlu menjalin kerjasama yang baik antara fasilitator dengan masyarakat karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik ketika pelaksanaan di lapangan akan sedikit berbeda. Dengan adanya 120 Anggota Balakar yang sudah direkrut akan memudahkan petugas-petugas Damkar

Tangsel dalam menanggulangi bencana kebakaran di Wilayah Kota Tangerang Selatan bila terjadi kebakaran. Tujuan kami adalah untuk mengedukasi warga tentang bahaya kebakaran dan cara mengulanginya dan mengurangi rasa kepanikan warga dan kewaspadaan warga pada lingkungannya dalam hal kebakaran.

Barisan Relawan Kebakaran dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus Bersinergis dalam urusan Bencana kebakaran, dalam tahapan ini balakar difokuskan pada 54 kelurahan dan masing-masing kelurahan memiliki 2 personil. Misi dari balakar adalah mampu mensosialisasikan dan membantu petugas damkar mengatasi kebakaran disetiap daerah yang rawan kebakaran.

Peran Balakar sebagai bentuk kewajiban masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran masyarakat kota khususnya Kota Tangerang Selatan, sangat sibuk dengan urusannya masing-masing. Sementara ancaman bahaya kebakaran tidak pernah dapat diduga kapan datangnya, karena itu ada satuan khusus masyarakat untuk menanggulangi ancaman bahaya kebakaran. Peran Balakar disini sangatlah penting sebagai komponen aktif penanggulangan kebakaran, sejak mulai pencegahan hingga saat terjadi kebakaran. Balakar diharapkan menjadi satuan pemadam kebakaran yang paling pertama kali menangani di lokasi atau lingkungan mereka dan melakukan upaya-upaya pemadaman.

### **Tahap Evaluasi**

Pada tahap ini dilakukan sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan fasilitator terhadap program pemberdayaan yang telah dilakukan. Evaluasi sebaiknya dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama-sama dengan fasilitator. Perekrutan Anggota Balakar ini akan menjadi mitra Pemadam Kebaran Tangerang Selatan untuk dijadikan seorang relawan yang memiliki karakter dan pengetahuan serta kemampuan dalam penanggulangan bencana kebakaran, mereka akan dilatih selama tiga hari dengan teknik dan cara penanggulangan bencana kebakaran dengan alat-alat Pemadam Kebakaran yang ada.

Upaya dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menanggulangi kebakaran adalah dalam bentuk POSKO Pemadam Kebaran ,terdapat 7 POSKO di Wilayah Kota Tangerang Selatan. Untuk mempercepat menuju ke tempat kejadian apabila terjadi kebakaran dan sosialisasi kepada masyarakat dan adanya pembekalan alat proteksi kami belum bisa membekali warga karena terkendala dengan anggaran tetapi dalam jangka Panjang bisa di realisasikan, sementara waktu warga dilibatkan dalam hal koordinasi disaat terjadinya kebakaran.

Mengingat setiap kejadian bencana, masyarakat yang menjadi korban dan sekaligus yang memberikan pertolongan pertama terhadap korban, oleh karena itu diperlukan penguatan dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, sehingga masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pelatihan khusus sebagai relawan penanggulangan bencana kebakaran.

### **Tahap terminasi**

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan. Terminasi sebaiknya dilakukan jika masyarakat sudah bisa mandiri, bahkan dilakukan karena penyandang dana telah menghentikan bantuannya. Pada tahapan ini masyarakat yang dilibatkan dalam penggulungan kebakaran dan dilatih oleh Petugas Dinas Pemadam Kebakaran belum bisa di libatkan untuk ikut piket 24 sama seperti petugas Pemadam karena belum ada regulasinya di Kota Tangerang Selatan maka dari itu, setelah kegiatan pembekalan pelatihan masyarakat kembali ke lingkungan dan siap membantu petugas pemadam apabila terjadi indikasi atau telah terjadinya kebakaran di wilayah mereka.

Pembentukan tidak diadakan setiap tahun akan tetapi setahun 2 (dua) kali kami adakan kegiatan Latihan Bersama dengan kami petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan agar pengetahuan tim Balakar tidak lupa dan terus terbiasa dalam membantu kami dalam penanggulangan kebakaran dan mengurangi terjadi kebakaran. Pada tahapan ini, sebagian masyarakat yang telah melaksanakan pelatihan pemadam kebakaran yang diadakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan memiliki tugas yaitu dalam upaya mencegah dan melaksanakan kegiatan penyelamatan dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Hal ini dikarenakan fungsi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan tugas yang sangat dinamis dan memerlukan penanganan yang benar-benar cermat dari segenap anggota pemadam kebakaran maupun masyarakat terkait. dalam pencegahan bahaya kebakaran harus terencana dengan baik karena tugas dimaksud memiliki tingkat resiko dan kerawanan yang tinggi. Oleh karena itu peningkatan profesionalisme baik bagi anggota pemadam maupun masyarakat melalui pelatihan guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang penanggulangan bahaya kebakaran harus benar-benar ditingkatkan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Pemberdayaan Dinas Pemadaman dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan oleh Balakar, namun belum optimal karena kekurangan anggaran dan sarana penanggulangan bencana bahaya kebakaran, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang di adakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran untuk masyarakat Balakar, maka Pemberdayaan warga dapat di ukur dengan tahapan-tahapan yaitu : tahap persiapan, tahap assessment, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap formulasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, tahap terminasi. Masyarakat dan pelaku usaha juga dapat memahami berbagai aturan-aturan yang berlaku agar upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat dilaksanakan secara maksimal.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan perlu membuat suatu aplikasi yang dapat di unduh dan terhubung dengan seluruh media agar masyarakat dapat mengakses dan memberikan informasi

secara mudah mengenai penanggulangan, penyelamatan serta pemadaman kebakaran. Pemerintah Kota Tangerang Selatan perlu membuat aturan yang berisikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak mentaati Berita Acara Pemeriksaan (BAP) alat proteksi kebakaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan pada bangunannya. Hal ini bertujuan agar bangunan-bangunan yang digunakan oleh masyarakat tersebut dapat mencegah secara dini terjadinya kebakaran serta mengurangi resiko jatuhnya korban. Perlu penambahan sarana penanggulangan bahaya kebakaran dengan didukung alat Proteksi kebakaran, perlu peningkatan anggaran dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kebakaran pada masyarakat. Serta dibutuhkan penambahan Sumber Daya Manusia (BALAKAR) bagi setiap daerah rawan bencana kebakaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Prosedur Penelitian*. Bina Aksara. Jakarta.
- Riza, Risyanti, Roesmidi. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: AlQaprint Jatinangor
- Hubies, Aida Fitalaya S. 1997. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan*. Pustaka Hidayah. Bandung.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peraturan Daerah (*Perda*) Nomor 04 Tahun 2015 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- Siagian, P. Sondang. 1997. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suradinata, Ermaya. 1996. *Manajemen Sumberdaya Manusia : Suatu Tinjauan Wawasan Masa Depan*. Ramadhan. Bandung
- Wrihatnolo, Riant. 2007. *Tentang Pemberdayaan dalam organisasi*. Jakarta